

**PROGRAM PHBM DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI.
LAYAKKAH DIPERTAHANKAN???**
(Studi kasus di kawasan TN Alas Purwo)
Oleh : Bagyo Kristiono, SP. /Polhut Pelaksana Lanjutan

A. PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)

PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan maupun dengan Pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. PHBM merupakan gagasan baru yang ditawarkan dan diyakini sebagai bagian dari transformasi perhutanan sosial yang didesain dengan pola yang berbeda dengan pola sebelumnya. Berikut ini sketsa transformasi perhutanan sosial, desain substansi dan implementasi PHBM secara normatif-ideal sebagaimana didengung-dengungkan selama ini.

Dasar implementasi PHBM pada awalnya adalah SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Setelah beberapa tahun berjalan SK tersebut diganti dengan surat keputusan baru untuk memperbaiki implementasi PHBM. Pertama adalah SK Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus. Dan yang paling baru adalah SK Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/Dir/2009 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pada mekanisme penerapan PHBM sebagai sebuah model tata pengurusan hutan (*forestry governance model*) terdapat pilar-pilar penting di dalamnya yaitu : kelembagaan masyarakat, mekanisme kerjasama dalam bingkai kemitraan dan manajemen konflik. Pada pilar kelembagaan masyarakat, beradanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) kemudian ditempatkan sebagai keharusan dalam konteks pihak—kelembagaan—yang menjadi mitra utama pada implementasi PHBM. LMDH sendiri didesain mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai mekanisme penyelenggaraan lembaga baik secara internal maupun dalam konteks keperluan eksternal dengan Perhutani atau pihak lain. Dari sini, Semestinya dapat dikatakan bahwa kedudukan LMDH adalah independen dan semata-mata merupakan representasi kepentingan MDH yang bersangkutan.

Program PHBM menurut masyarakat telah memberikan manfaat berupa:

1. Penyerapan tenaga kerja di desa sekitar hutan.
2. Memberi kesempatan berusaha di sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa.
3. Bagi hasil dari produksi hutan berupa kayu dan non kayu.
4. Pendapatan dari produksi tanaman pangan kegiatan tumpangsari di lahan hutan seperti padi, jagung, kacang-kacangan.

Dalam konteks perjalanan panjang riwayat eksploitasi tersebut, tentulah mengemuka persepsi dan penilaian yang pada umumnya berada pada rentang garis kesimpulan bahwa pengelolaan hutan berbasis negara (*state based forest management*) tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat yaitu masyarakat yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara yang pemenuhan kebutuhan hidupnya memang harus tergantung dari sumberdaya hutan.



Gambar : Kawasan PHBM yang berbatasan dengan kawasan TN (kiri) dan lahan pertanian PHBM yang ditanami tanaman semusim (kanan/dari foto udara)

B. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi merupakan kawasan yang dilindungi dengan fungsi pokok konservasi biodiversitas dalam lingkungan alaminya atau sebagai “konservasi in situ”, yaitu konservasi ekosistem dan habitat alami serta pemeliharaan dan pemulihan populasi spesies-spesies dalam lingkungan alaminya. Isu penting konservasi biodiversitas adalah mempertahankan integritas ekologis kawasan (UU No 5 / 1990). Biodiversitas disini menjelaskan tentang keanekaragaman hayati baik flora dan fauna.

Perlindungan terhadap keutuhan kawasan konservasi dan biodiversitas yang terkandung di dalamnya merupakan salah satu kegiatan konservasi yang bertujuan untuk menjaga keaslian biodiversitas dalam rangka mempertahankan fungsi dan peranan taman nasional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kawasan konservasi.



Gambar : Hutan bambu (Kiri atas), satwa Rusa (kanan atas) dan hutan hujan dataran rendah (bawah) di kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Idealnya setelah kawasan konservasi sebelum berbatasan dengan kawasan hutan produksi harus ada kawasan penyangga-nya. kawasan penyangga adalah daerah tertentu yg menjadi penyangga daerah lain untuk pelestarian

lingkungan. Kawasan penyangga ini berfungsi untuk menyaring segala sesuatu yang akan masuk ke dalam kawasan konservasi yang dapat merusak keutuhan kawasan konservasi.

Taman nasional Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang berupa dulunya adalah Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan. Perubahan fungsi kawasan dari suaka margasatwa menjadi taman nasional didasarkan atas surat penunjukan Menteri Kehutanan nomor: 283/Kpts-II/1992 dengan luasan 43.420 ha. Keterwakilan ekosistem peralihan antara hutan hujan dataran rendah dan hutan musim merupakan alasan dalam perubahan fungsi kawasan, selain adanya *flag spesies* yaitu Macan Tutul (*Panthera pardus*) dan Banteng (*Bos javanicus*) serta daya tarik wisata alam yang dimilikinya.

Secara administrasi TNAP berada di Desa Kalipait Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi. Landscape Taman Nasional Alas Purwo terdiri dari daerah pantai (perairan, daratan dan rawa), daerah daratan hingga daerah perbukitan dengan ketinggian mulai 0 – 322 meter dpl. Daerah pantai di Taman Nasional Alas Purwo melingkar mulai dari Segoro Anak hingga daerah Muncar dengan panjang garis pantai sekitar 105 km. Berbagai kondisi landscape yang ada di dalam kawasan telah menjadikan kawasan taman nasional kaya akan formasi vegetasi, mulai dari formasi hutan mangrove, formasi hutan pantai hingga hutan hujan dataran rendah. Tipe vegetasi yang ada berdasarkan proses terjadinya (khusus tipe vegetasi buatan) di Taman Nasional Alas Purwo terdapat dua tipe vegetasi buatan yaitu: Hutan Tanaman dan Padang Penggembalaan Sadengan. Dengan banyaknya tipe vegetasi yang ada telah memberikan implikasi pada tingginya keanekaragaman spesies yang ada baik flora maupun faunanya.

C. Permasalahan yang mungkin timbul

Dari dua gambaran tentang PHBM dan Kawasan Konservasi diatas adalah dua hal yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Disatu sisi (PHBM) diperlukan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat dan disisi lainnya (Kawasan konservasi) diperlukan untuk kepentingan ekologi. Apabila dua hal tersebut diperdebatkan yaitu antara sosial ekonomi masyarakat dan ekologi tidak akan pernah ada titik temu. Masyarakat sekitar membutuhkan

lahan untuk kebutuhan ekonomi mereka dengan ditanami tanaman pertanian sedangkan kawasan konservasi sebagai benteng bagi biodiversity yang ada di dalamnya.

Sebagai contoh di kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Produksi Perum Perhutani Banyuwangi Selatan. Di kawasan hutan produksi yang dikerjasamakan dengan masyarakat dalam program PHBM ada beberapa kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan zona Rimba, zona Tradisional dan zona Rehabilitasi TNAP.

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang mungkin bisa timbul akibat adanya kegiatan PHBM tersebut :

1. Konflik satwa liar.

Konflik satwa liar dengan pesanggem sangat mungkin terjadi, karena PHBM melakukan sistem penanaman tumpangsari dengan tanaman pertanian berupa padi, jagung, serta kacang-kacangan.



Gambar : Tanaman kacang tanah yang ditanam pesanggem

Tanaman tersebut adalah jenis tanaman yang sangat disukai oleh satwa. Satwa dari dalam hutan akan keluar apabila di sekitar hutan ada sumber pakan yang lebih banyak dan tersedia. Satwa yang keluar tersebut oleh para pesanggem PHBM dianggap sebagai hama sehingga perlu penanganan. Adapun jenis satwa yang sering keluar adalah kera ekor panjang, babi hutan dan rusa. Bahkan babi hutan dan kera sering masuk sampai ke persawahan desa, sehingga mengganggu aktivitas warga dan pernah ada warga yang diserang oleh satwa tersebut. Untuk menangani hal tersebut pihak taman nasional bekerjasama dengan instansi terkait berusaha menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang

membahayakan bagi satwa liar dan melakukan penggiringan satwa kembali ke dalam hutan.

2. Perburuan Liar.

Karena banyaknya satwa yang keluar dari kawasan hutan, menarik minat bagi para pemburu liar untuk melakukan aktivitasnya, karena dianggap sudah diluar kawasan hutan konservasi. Dari beberapa pengalaman yang terjadi ada beberapa modus perburuan antara lain pemasangan jerat satwa dan menggunakan senjata api.

3. Perambahan kawasan

Perambahan kawasan adalah hal yang paling rawan dilakukan oleh pesanggem PHBM. Motivasi mereka adalah untuk mendapatkan lahan yang lebih luas sehingga akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Apalagi biasanya kawasan taman nasional belum melakukan pemasangan pal batas kawasan. Para pesanggem biasanya berdalih bahwa mereka masih belum tahu batas-batas kawasan taman nasional alas purwo. oleh karena itu kegiatan pemeliharaan pal batas dan lorong batas kawasan sangat perlu dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi hal tersebut.

4. Pemindehan/perusakan patok batas kawasan.

Untuk melancarkan aksi perluasan lahan, salah satu cara bagi para pesanggem adalah memindahkan pal batas kawasan konservasi atau merusak dan menghilangkan pal tersebut. Dengan demikian mereka bisa berdalih bahwa kawasan tersebut belum masuk ke dalam kawasan taman nasional sehingga mereka bisa bebas mengerjakannya. Upaya yang dilakukan taman nasional untuk mengantisipasi hal tersebut adalah pembuatan pal batas yang lebih kuat dan sering dilakukan pengecekan pal batas tersebut.

5. Penebangan liar.

Karena para pesanggem biasanya membuat gubuk di lokasi lahan garapan mereka di hutan produksi yang dikerjasamakan dengan masyarakat, mereka lebih mudah mengamati gerakan dan kebiasaan petugas taman nasional. Pada saat-saat tertentu mereka memanfaatkan kelengahan petugas taman nasional untuk melakukan kegiatan penebangan liar. Ada juga mereka hanya memberikan informasi pelanggaran agar memudahkan

pelanggar melakukan tindak pidana kehutanan baik penebangan liar maupun perburuan liar.



Gambar : Tunggak bekas penebangan liar di kawasan taman nasional.

6. Kebakaran Hutan.

Kebakaran hutan adalah hal yang paling sering terjadi terutama pada saat menjelang musim penghujan. Biasanya kebakaran hutan terjadi pada saat pesanggem membuka lahan mereka. Mereka membersihkan lahan dengan cara membakar karena dianggap lebih cepat dan murah. Mereka membakar dengan cara mereka sendiri tanpa mengikuti aturan yang ada sehingga lahan yang mereka bakar kadang tidak terkendali sehingga merembet ke dalam kawasan hutan taman nasional. Untuk itu upaya penyuluhan dan penyadaran masyarakat harus terus-menerus dilakukan selain dengan pemeliharaan sekat bakar guna mengantisipasi kebakaran hutan ke dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo.



Gambar : Kebakaran hutan di zona Rimba akibat rembetan dari hutan produksi

D. Penutup

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan program PHBM hutan produksi oleh masyarakat pesanggem yang berbatasan dengan kawasan konservasi dalam hal ini Taman Nasional Alas Purwo terdapat dua dampak yang bisa ditimbulkan. Dampak baiknya adalah bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan yang mengelola lahan hutan produksi yang ditumpangsarikan dengan tanaman pertanian. Sedangkan dampak negatifnya juga tidak kalah banyak mulai dari adanya konflik satwa dengan masyarakat, perambahan kawasan, perburuan liar, penebangan liar sampai kebakaran hutan.

Dampak ekonomi dibandingkan dengan dampak ekologi memang tidak bisa dibandingkan. Dan keduanya tidak bisa diperdebatkan, apabila hal tersebut terjadi maka akan sulit dicarikan titik temunya. Akan tetapi menurut pandangan penulis alangkah lebih bijaksananya apabila kegiatan PHBM tidak dilakukan di lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, sehingga keutuhan ekologi kawasan konservasi bisa dijaga untuk diwariskan kepada anak cucu kita.